PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 08 Maret 2018 Halaman: 1

Wawali Janji Perbaiki Parameter Kinerja

WAKIL Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai prosentase yang paling besar ada pada presensi yakni sebesar 60 persen.

Walau demikian, ia berjanji bahwa penilaian dengan porsi presensi besar tidak akan berlangsung lama.

"Penilaian presensi 60 persen itu adalah sistem yang kita terapkan saat ini. Tidak akan lama. Setidaknya hanya digunakan tiga bulan, Januari hingga Maret. Selanjutnya akan dinilai dengan sistem yang telah kita perbaiki," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (6/3).

Ia berjanji bahwa nanti ketika sistem penilaian telah diperbaiki, maka akan menunjukkan *reward* kepada mereka yang bekerja dengan baik dan bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan memiki kontribusi pada kinerja mereka sendiri, OPD, dan kinerja Pemerintah Kota.

"Tiga level untuk ukurannya yakni kinerjanya pribadi, kinerja OPD, dan kontribusinya terhadap program strategis Pemkot. Tetapi itu nanti masih ada variabel-variabel lainnya," tandasnya.

Heroe menjelaskan bahwa penilaian dengan sistem baru nanti akan menunjukkan apa yang dilakukan setiap harinya bisa terekam dan bisa memberikan variabel berbeda tiap orang.

● ke halaman 11

Wawali Janji Perbaiki Parameter

● Sambungan **Hal 1**

Penyempurnaan penghitungan TPP ke depan akan didasarkan pada presensi, kinerja organisasi, hukuman disiplin, inovasi OPD, realisasi program unggulan sesuai misi Walikota/ Wakil Walikota dalam RPJMD, Prestasi OPD, aktifitas harian pegawaim dan efisiensi anggaran berbasis *capaian outcome*.

"Nanti presensi akan jauh turun tidak 60 persen. Yang kita dorong kinerja dan prestasi. Kalau presensi sudah *include* di gaji. Ini skema lama yang sekarang dipakai dan akan diperbaiki," janjinya.

TPP ini, ujarnya, merupakan tunjangan yang digunakan untuk memacu prestasi sekaligus meningkatkan pendapatan PNS. "Jangan sampai tambahan ini tidak menunjukan kenaikan kinerja pekerja. Intinya satu dan yang lain ada rasa tidak adil akan selalu kita perbaiki sampai mencapai keadilan," tutupnya.

Tanggapan publik

Sebelumnya, parameter untuk mengukur kinerja yang akan menjadi dasar besaran tunjangan ini mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Alimatul Qibtiyah, Ketua Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) DIY meminta presensi pegawai yang menempati porsi terbesar layak untuk ditinjau ulang.

"Perlu ditinjau ulang, apakah benar seperti itu. Masak absen sampai 60%, dan kenapa kinerja hanya 20%. Artinya administratif bisa mengalahkan subtantif," kata Alimatul.

Bagi Alimatul presensi sebenarnya juga penting, namun akan lebih baiknya jika porsinya lebih dikurangi. "Harusnya dilihat kinerjanya, bukan absennya. Hal tersebut sangat bersifat administratif, bukan subtantif. Mungkin lebih baik dibalik saja, 20% untuk kehadiran, dan 80% nya untuk kinerja. Mungkin itu lebih subtantif," ungkapnya.

Dikhawatirkan, jika pemberian tunjangan didasarkan kepada presensi absen yang memiliki porsi lebih banyak, akan mempengaruhi mentalitas ASN. "Takutnya mempengaruhi mentalitas ASN. Sudah banyak anggapan dimasyarakat bahwa ASN itu adem ayem. Jika ditambah dengan adanya tunjangan yang bersifat administratif, maka akan melanggengkan anggapan bahwa bekerja yang selamat ya jadi ASN," ucapnya.

Senada adalah apa yang disampaikan Sunarka, Direktur IDEA. Sunarko berharap indikator presensi ditinjau kembali.

"Sekarang yang perlu diperbaiki adalah indikatornya. Presensi penting hanya saja sebaiknya bukan jadi indikator dominan sebuah kinerja. Bisa saja presensi pagi, tapi ngga kerja maksimal terus sore presensi pulang," ujar Sunarka.

Lanjut Sunarka, ketika kebijakan ini digulirkan memang bertujuan agar kinerja ASN lebih baik, perlu kemudian disadari dan juga dilihat sisi lain di antaranya, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta masih tinggi dan tingkat kesenjangan juga paling tinggi di Indonesia.

Agus Heruanto Hadna, Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM melihat ada kecenderungan di instansi pemerintah, tunjangan kinerja diberikan dengan tidak membedakan siapa yang berprestasi atau tidak, seolah-olah itu tambahan gaji. Itu yang tidak boleh.

Permasalah lain menurutnya, instansi pemerintah itu selalu menghadapi persoalan kedisiplinan. "Misal pegawai datang terlambat, bolos. Kalau itu masalahnya, berarti indakator kehadiran perlu diperhitungkan," tegasnya. **(kur/nto/yud/cr2)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. BKPP 3. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005